

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah maupun swasta tentunya memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh instansi tersebut. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu terkait dengan pelaporan keuangan. Apalagi jika instansi tersebut berada pada naungan negara yang mana memerlukan pertanggungjawaban yang harus diketahui oleh semua orang dan tentu pelaporannya harus dibuat selama satu periode. Pada instansi pemerintah maupun swasta membuat laporan keuangan yang di dalamnya berisikan suatu pertanggungjawaban atas seluruh kekayaan yang dimiliki, dimana terdiri dari laporan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada instansi tersebut.

Pelaporan kekayaan dalam instansi pemerintahan harus bisa diandalkan, karena semua yang ada di pemerintahan itu dominan berasal dari rakyat. Maka untuk meningkatkan kepercayaan tersebut perlu adanya pelaporan, dan pelaporan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran. Anggaran yang sudah diberikan kepada instansi tersebut harus mencapai tujuan dan sasaran selama satu periode. Tujuan dan sasaran ini berupa suatu perwujudan dari kewajiban instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalannya dalam melaksanakan visi dan misi dari instansi tersebut. Dalam melaksanakan tujuan dari instansi tersebut tentunya harus memiliki sumber dana, sumber dana pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa pengadaan barang/jasa ini sangat penting untuk suatu instansi dalam memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang mengatur penerimaan serta pengeluaran negara dalam membiayai segala kegiatan pemerintah baik itu pembangunan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, serta stabilitas perekonomian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentunya digunakan untuk membeli berbagai barang/jasa yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dari suatu instansi. Barang yang dibeli dan dibebankan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sering kita sebut sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Pengadaan Barang Milik Negara mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada suatu instansi. Pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk perolehan suatu aset berupa barang/jasa dan juga dengan pengadaan ini dapat dilihat juga apakah para pengguna menggunakannya dengan baik atau tidak, serta pelaporannya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kapasitas hukum, transparansi dan juga akuntabel. Maka dari itu, pengguna barang harus melakukan pelaporan terkait dengan Barang Milik Negara yang diperoleh sehingga kita dapat melihat adanya tertib administrasi dan tertib aset. Untuk menciptakan tertib administrasi dan tertib aset, maka pengguna barang harus melakukan *input* pada SIMAK-BMN di lingkungan satker. Penginputan pada SIMAK-BMN ini dilakukan oleh BUTPAA



Garut. BUTPAA Garut merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN (LAKIN, 2019). Sehingga pelaporan terkait perolehan barang, pelaporan barang, atau penghapusan barang semua harus dilaporkan ke pusat LAPAN. Pelaporan Barang Milik Negara ini dilaporkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), selain itu ada pelaporan pada aplikasi persediaan, dan aplikasi lainnya. Dari semua aplikasi yang ada pelaporan utamanya ada pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang berisi laporan keuangan.

Laporan Barang Milik Negara ini dibuat berdasarkan data yang ada dan harus sesuai dengan keadaan barang/jasa yang dimiliki oleh instansi tersebut dan dilaporkan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Namun, sebelum adanya *input* data pada Aplikasi SIMAK-BMN tentunya melewati proses pengadaan dan pembelian barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUTPAA Garut ini dilakukan dengan 4 cara yaitu pengadaan dengan pemilihan langsung, pengadaan dengan penunjukan langsung, pengadaan dengan swakelola, dan pengadaan dengan lelang. Pengadaan yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh barang/jasa untuk menunjang segala kegiatan. Pada aplikasi SIMAK-BMN ini merupakan aplikasi yang membantu pelaporan terkait dengan aset tetap, aset lainnya, dan persediaan dimana persediaan ini terinput dari aplikasi persediaan yang masuk ke SIMAK-BMN, dari SIMAK-BMN akan masuk pada aplikasi SAIBA. Pada aplikasi SAIBA ini semua data laporan keuangan dari perusahaan yang terdiri dari aset yang ada pada SIMAK-BMN, persediaan yang di *input* dari aplikasi persediaan, serta liabilitas dan ekuitas semua data berada pada aplikasi SAIBA.

BUTPAA Garut sebagai salah satu satuan kerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk memperoleh barang/jasa yang akan dijadikan sebagai penunjang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUTPAA Garut. Namun, pada BUTPAA Garut sendiri belum memiliki sistem pengadaan yang terperinci seperti kebijakan, fungsi, dokumen dan catatan, bagan alir (*flowchart*) serta prosedur, dan pengendalian internal yang belum dibuat dalam suatu dokumen. Dimana sistem pengadaan Barang Milik Negara ini sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses sistem pengadaan barang/jasa secara rinci yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem pengadaan barang/jasa ini dimulai dari perencanaan, pembelian barang, pembayaran sampai *input* data pada SIMAK-BMN hal ini bertujuan agar semua orang dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUTPAA Garut. Dari uraian diatas, maka laporan tugas akhir yang penulis ambil terkait dengan judul “**Sistem Pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (BUTPAA Garut)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka permasalahan yang penulis ambil pada tugas akhir ini :

1. Apa saja kebijakan umum yang terdapat pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut terkait proses pengadaan Barang Milik Negara?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2. Apa saja fungsi yang terkait dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut?
4. Bagaimana prosedur beserta bagan alir (*flowchart*) dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut?
5. Bagaimana pengendalian internal yang terdapat dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Menguraikan kebijakan umum yang terkait proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
2. Menguraikan fungsi yang terkait dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
4. Menjelaskan prosedur beserta bagan alir (*flowchart*) dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
5. Menjelaskan pengendalian internal yang terdapat dalam proses pengadaan Barang Milik Negara pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, maka manfaat dari penulisan tugas akhir ini :

1. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah yang bisa digunakan untuk membuat karya ilmiah tentang sistem pengadaan Barang Milik Negara pada suatu instansi yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Bagi Balai
Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan terkait dengan sistem pengadaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh BUTPAA Garut.



4

3. Bagi Penulis

Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi, dan sebagai penambah wawasan, serta dapat menerapkannya dalam praktik, dan dapat dijadikan tugas akhir.

4. Bagi Pembaca

Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dan sebagai acuan untuk pembaca dalam membuat suatu laporan atau tugas akhir yang terkait dengan sistem pengadaan Barang Milik Negara.

 Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies